



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURHADI SUSANTO
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN, ASET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 849545

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.870.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA NGAWI, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
3. Tanah Seluas 3.665 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN Rp. 900.000.000
4. Tanah Seluas 2.900 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **634.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOTOR, SUZUKI INAZUMA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
3. MOBIL, VW VW NEW BEETLE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
5. MOTOR, YAMAHA FILANO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	142.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.646.000.000
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.496.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.